



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



LOEFTI/DUTA

Pemaparan masterplan penataan kota di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa,(6/1/26).

Bupati : Pentingnya Masterplan Penataan Kota Atasi Banjir

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan pentingnya penyusunan masterplan penataan kota sebagai landasan utama penanganan banjir yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat menghadiri pemaparan masterplan penataan kota di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa sore,(6/1/26).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, Kepala Bappeda Sidoarjo M. Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Makhmud, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Dalam paparannya, tim penyusun masterplan mengusung tema "Membangun Sidoarjo yang SERASI" (Sentosa, Ekologis, Resilien, Akses-

bel, Sinergis, dan Beridentitas) yang menjadi arah pembangunan daerah, khususnya dalam penataan ruang dan pengendalian banjir, selaras dengan RTRW 2024-2044 serta RPJPD 2025-2045.

Subandi menyampaikan bahwa Sidoarjo sebagai wilayah Kota Delta memiliki tantangan geografis yang kompleks, dengan banyak sungai afvoer serta pengaruh air laut pasang atau rob.

"Banjir di Sidoarjo tidak hanya disebabkan luapan sungai, tetapi juga dipengaruhi air laut pasang. Ini yang harus kita antisipasi secara terencana," ujar Subandi.

IA mengakui keterbatasan anggaran daerah yang saat ini berada di kisaran Rp5,8 miliar, sehingga diperlukan perencanaan matang untuk menentukan prioritas penanganan banjir secara bertahap.

"Masterplan ini ibarat diagnosis penyakit. Dengan data dan pemetaan yang detail, kita bisa menentukan titik penanganan

setiap tahun sesuai kemampuan anggaran," tegasnya.

Beberapa kawasan yang menjadi perhatian khusus antara lain Kecamatan Tanggulangin, Candi, dan Waru yang kerap dilanda banjir, serta kawasan perkotaan dengan permasalahan drainase akibat bangunan liar di sepanjang saluran.

Subandi menekankan bahwa penataan kota dan penanganan banjir merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Dengan grand design ini, kita punya arah yang jelas. Harapannya, setiap tahun ada perubahan nyata yang bisa dirasakan masyarakat," tandasnya.

Sebagai informasi, Masterplan Penataan Kota Sidoarjo mencakup empat sektor utama, yakni sistem drainase dan pengendalian banjir, rehabilitasi infrastruktur jalan, reabilitasi dan pengembangan, serta revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH). • Loe

Pemkab Bakal Perbaiki 68 Sekolah Rusak

Anggaran Lebih dari Rp 19,8 Miliar

SIDOARJO – Program perbaikan sekolah bakal berlanjut tahun ini. Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo berencana merehab 68 lembaga pendidikan yang dinilai sudah rusak. Selain Sekolah Dasar (SD), program juga menasas Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sidoarjo Tиро Ади mengatakan, anggaran rehab sekolah tahun lalu mencapai Rp 19,8 miliar. Jumlahnya berpotensi bertambah tahun ini. "Kami berharap alokasi untuk perbaikan bisa lebih tinggi," kata Tиро.

Menurut dia, setiap sekolah



TINJAU PERBAIKAN: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana mengecek fasilitas pembelajaran di SDN Sidodadi yang baru direhab.

mendapatkan dana berbeda. Hal itu bergantung pada tingkat kerusakannya. "Nanti dilihat kategorinya rusak ringan atau berat dan akan dihitung kebutuhannya," tambah Tиро. Sebelumnya, tahun 2025 lalu, dikbud telah merehab 146 sekolah. Salah satu sekolah yang diperbaiki yakni SDN

Sidodadi di Candi Total. Total bantuan yang diterima sekolah tersebut mencapai 952 juta dan dipergunakan untuk pembuatan empat ruang kelas.

Cek Langsung Sekolah

Kemarin (7/1), Wabup Sidoarjo Mimik Idayana tu-



“Nanti dilihat kategorinya rusak ringan atau berat dan akan dihitung kebutuhannya.”

Tиро Ади
Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Sidoarjo

run langsung melihat hasil perbaikan. Tidak hanya memantau bangunan. Namun fasilitas pembelajaran juga mendapat perhatian.

Mimik mengapresiasi hasil revitalisasi di SDN Sidoda-

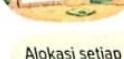
PERBAIKAN SEKOLAH TAHUN INI

Ada 68 sekolah yang bakal diperbaiki



Anggarannya di atas Rp 19,8 miliar

Perbaikan menasas SD dan SMP



Alokasi setiap sekolah menyesuaikan tingkat kerusakan

sumber: Dikbud Sidoarjo

GRAFIS: HERLAMBANG/JAWA POS

di. "Saya sudah cek bangunan dan bangkunya. Saya berharap anak-anak semangat belajarnya di kelas yang baru," katanya. (eza/hen)

Jawa Pos



Revitalisasi Alun-Alun Tinggal Pembersihan

KOTA-Revitalisasi Alun-alun Sidoarjo tinggal selangkah lagi. Progres fisik proyek ini bahkan sudah menyentuh angka 99,9 persen. Namun, meski hampir sempurna, kawasan ruang publik kebanggaan warga Kota Delta itu belum bisa dibuka. Tinggal menunggu pembersihan saja.

Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Tata Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Heri Santoso menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menyatakan proyek selesai sebelum seluruh pe-

kerjaan benar-benar tuntas 100 persen.

"Sekarang progresnya sudah 99,9 persen, tinggal sedikit lagi, pembersihan saja," ujarnya, Rabu (7/1).

Meski begitu, pihaknya masih belum menyatakan selesai sembari menunggu progres benar-benar 100 persen. Selepas itu akan dilakukan Berita Acara Serah Terima (BST).

Menurut Heri, sesuai kontrak awal, proyek revitalisasi Alun-alun Sidoarjo seharusnya rampung pada 15 Desember 2025. Namun,

● Ke Halaman 10



IST

DITUNGGU: Revitalisasi Alun-alun Sidoarjo yang sempat molor saat ini nyaris rampung dikerjakan oleh kontraktor.

Revitalisasi Alun-Alun...

pihak penyedia jasa mengajukan perpanjangan waktu selama 30 hari dan telah disetujui Pemkab Sidoarjo, sehingga batas akhir pekerjaan jatuh pada 14 Januari 2026.

Meski diberikan tambahan waktu, sanksi tetap diberlakukan jika pekerjaan melewati masa kontrak.

“Sesuai ketentuan, dendaanya 0,01 persen dari nilai kontrak per hari.

Nilai kontraknya Rp 24,6 miliar, jadi dendanya sekitar Rp 24,6 juta per hari,” jelasnya.

Namun demikian, total denda yang harus dibayarkan kontraktor hingga saat ini belum dapat dipastikan. Perhitungannya baru bisa dilakukan setelah BST resmi ditandatangani.

“Bahasanya dari SK berakhir sampai BST, itu dikalikan Rp 24,6 juta per hari. Sekarang masih berjalan, jadi belum bisa ditotal karena memang

belum selesai,” imbuhnya.

Sebelum BST dilakukan, lanjut Heri, proyek masih harus melewati pemeriksaan akhir oleh tim pengawas. Pemeriksaan tersebut mencakup kesesuaian Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) serta kondisi fisik bangunan di lapangan.

“Nanti akan dicek lagi semuanya, baik administrasi maupun fisiknya. Kalau sudah klop dan benar, baru BST ditandatangani,” pungkasnya. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



I EVALUASI: Jalan Gajah Mada Sidoarjo menjadi salah satu titik keramaian yang banyak digunakan untuk lahan parkir. Dishub Sidoarjo akan menerapkan parkir digitalisasi.

Parkir Siap Digital, Bisa Bayar Pakai QRIS

KOTA-Sistem parkir di Sidoarjo bersiap memasuki era baru. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tengah menyiapkan digitalisasi parkir dengan menerapkan pembayaran non tunai berbasis QRIS. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Budi Basuki mengatakan, saat ini pihaknya sedang mematangkan penerapan pembayaran parkir secara elektronik. Nantinya, pengguna jasa parkir tidak lagi membayar secara tunai, melainkan cukup memindai QRIS.

"Pengguna layanan parkir dapat melakukan pembayaran parkir lewat QRIS. Ini lagi kita siapkan pembayaran elektronik melalui QRIS," ujar Budi Basuki, Rabu (7/1).

Menurutnya, digitalisasi parkir menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan retribusi.

Dengan sistem non tunai, potensi kebocoran pendapatan dapat ditekan, sekaligus mempermudah pengawasan.

• Ke Halaman 10



Parkir Siap Digital,...

"Tahun ini sudah dikelola Dishub, mudah-mudahan target retribusi parkir tercapai," imbuhanya.

Budi Basuki juga menegaskan, sejak Kamis, 1 Januari 2026, pengelolaan parkir resmi berada di bawah kendali Dishub Sidoarjo. Pemungutan retribusi parkir pun sudah mulai dilaku-

kan sejak awal tahun tersebut.

"Per 1 Januari 2026 kemarin pengelolaan parkir sudah dilakukan Dishub Sidoarjo. Pemungutan retribusi parkir juga sudah dilakukan sejak Kamis, 1 Januari 2026," jelasnya.

Kebijakan digitalisasi parkir ini sejalan dengan arahan Bupati Sidoarjo Subandi. Orang nomor satu di Kota Delta itu sebelumnya meminta

agar pembayaran parkir tidak lagi dilakukan secara manual menggunakan karcis, melainkan beralih ke sistem digital.

"Coba dikoreksi ulang (pembayaran parkir, red), biar kita tidak memakai karcis manual karena saya ingin memaksimalkan pendapatan retribusi yang ada di Kabupaten Sidoarjo," tegasnya. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Perjuangan Panjang BNNK Sidoarjo Miliki Gedung Sendiri

PERJUANGAN panjang dari keluarga besar BNNK Sidoarjo, selama bertahun-tahun untuk bisa memiliki tempat kerja sendiri, pada akhir tahun 2025 lalu, akhirnya menjadi kenyataan.

Kepala BNNK Sidoarjo, Kombespol Gatot Soegeng

Soesanto SH, mengucap syukur Alhamdulilah kepada ALLAH SWT dan berterima kasih kepada Pemkab Sidoarjo yang telah menghibahkan aset tanahnya untuk keperluan Kantor BNNK, yang berada di alamat jalan Perum Taman Pinang blok

► ke halaman 11



HARIAN
Bhirawa
Wira Bajra Bina Bhertha

Perjuangan Panjang BNNK Sidoarjo Miliki Gedung Sendiri

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

AA8, nomor 1A, Kwadengan Barat, Lemahputro Kecamatan Sidoarjo.

“Kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada Pemkab Sidoarjo, ini perhatian yang sungguh luar biasa,” komentar Kombespol Gatot, Rabu (7/1) kemarin, di Kantor BNNK Sidoarjo.

Sebagaimana diketahui, BNNK Sidoarjo selama ini memang sudah memiliki gedung sendiri, yang dibangun dari dana APBN. Namun, tanahnya selama bertahun-tahun, masih bersifat pinjam pakai dari Pemkab Sidoarjo sejak 2012 lalu.

Dirinya mengungkapkan, di Provinsi Jawa Timur, masih banyak kantor BNNK yang masih belum memiliki tempat sendiri. Perhatian dari Pemkab Sidoarjo kepada BNNK Sidoarjo tersebut, menurut Kombespol Gatot, semoga bisa ditiru oleh Pemkab/Pemkot lain di Jawa Timur.

Penyerahan hibah berubah aset tanah itu, menurut Kombespol Gatot, tidak lepas dari evaluasi Pemkab Sidoarjo terhadap eksistensi BNNK Sidoarjo, selama ini dalam melaksanakan program P4GN atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

“Kalau kinerja kita menurun, pasti tentunya Pemkab Sidoarjo akan mikir -mikir untuk menghibahkan asetnya kepada kita,” kata Kombespol Gatot.

Penyerahan hibah tanah itu, menurut Kombespol Gatot, sebagai salah satu indikator Pemkab Sidoarjo telah mengevaluasi kalau BNNK Sidoarjo telah melaksanakan kinerjanya dalam P4GN dengan maksimal.

Maka dari itu, penyerahan hibah aset berupa tanah tersebut, kita harapkan akan dapat terus menjadi cambuk, untuk bisa melecut semangat kerja , semua keluarga besar BNNK Sidoarjo, dalam melaksanakan tugas untuk pencegahan dan pemberantasan Narkoba di wilayah Kabupaten Sidoarjo,” komentarnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



FOCUS: Impact Studies on Sustainable Globally Shared Assets

■ Atasi Banjir Secara Terpadu Pemkab Matangkam Masterplan Penataan Kota

THE WINTER FAIR. Katherina

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Consequently, the author has chosen to use the term "Imperial Chinese Nationalism" and "Imperial Chinese Nationalists" to denote the political movement and the political party respectively.

Italians participated in the early
years of the working-class movement. Many
of them became young DIAZI communists.
Bartolomeo Bortolotti, Alberto
Pecchioli, and Lucio Lanza were among
the earliest communists to join the
Fascist party. Bortolotti, a
former socialist, was one of the
most ardent supporters of the
Fascist party. He was a member of
the DIAZI group and was one of the
most active members of the party.

Despite the initial skepticism, the new research has shown that the effects of the new policies are significant and positive, particularly for the most vulnerable groups in society. The new policies have helped to reduce poverty and inequality, and have improved the overall well-being of the population. The new policies have also helped to create a more stable and sustainable economy, and have improved the environment. The new policies have been a success, and have been widely praised by both the public and the private sectors.

Pemkab Matangkan...

dipengaruhi oleh air laut pasang atau rob," jelas Subandi.

Subandi mengakui bahwa penanganan banjir membutuhkan dana yang besar, sementara anggaran daerah saat ini masih terbatas di angka Rp5,8 miliar. Oleh karena itu, masterplan ini menjadi instrumen krusial

untuk menentukan skala prioritas.

"Barat mengobati orang sakit, kita harus diagnosis dulu penyebabnya melalui masterplan ini. Dengan pemetaan yang detail, kita bisa menentukan titik mana yang harus ditangani setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan anggaran kita," tambahnya.

Beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus meliputi: Kawasan

Langganan Banjir: Tanggulangin, Candi, dan Waru. Kawasan Perkotaan: Fokus pada normalisasi saluran yang kini banyak terhimpit bangunan di sisi kanan dan kiri.

Bupati Subandi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak berpangku tangan. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab penataan kota adalah kerja kolektif.

"Semua stakeholder harus terlibat dalam penanganan ini. Dengan adanya grand design ini, kita punya tahapan yang jelas. Harapannya, ada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dari tahun ke tahun," tegasnya.

Sebagai informasi, Masterplan Penataan Kota Sidoarjo mencakup empat sektor intervensi utama: Sistem Drainase dan Pengendalian

Banjir, Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan (Sekolah), Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Melalui integrasi keempat sektor tersebut, Pemkab Sidoarjo berupaya mewujudkan kota yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga bertumbuh dalam harmoni lingkungan. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Perekaman KTP Elektronik Naik 60 Persen Selama Liburan

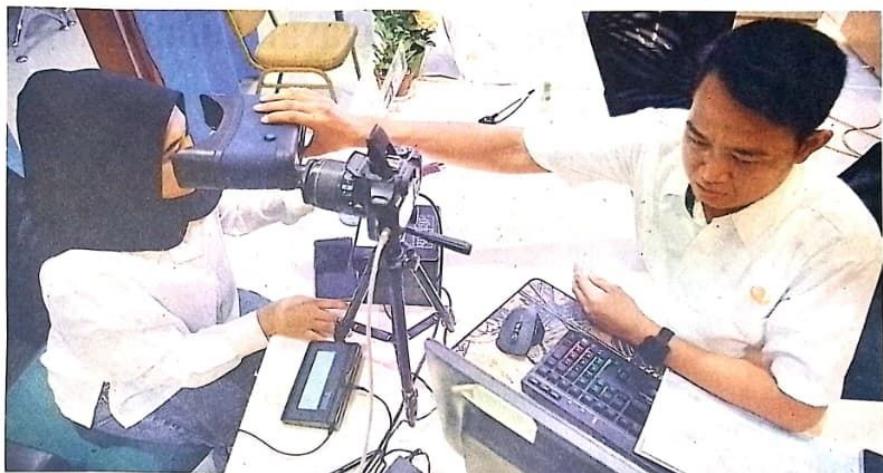
Disdukcapil Sebar
1.500 Blanko ke Kecamatan

SIDOARJO – Minat masyarakat untuk melakukan perekaman KTP elektronik selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 meningkat. Selama liburan, rata-rata per harinya ada 320 orang yang melakukan perekaman.

Kepala Disdukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma menyebutkan, pada hari biasa rata-rata hanya 190 orang yang menjalani perekaman. Jumlahnya meningkat 60 persen saat libur tiba yakni 320 orang. Total, selama libur nataru

ada 1.601 permohonan perekaman. Lonjakan didominasi pelajar yang baru masuki usia wajib KTP. Setelah libur berakhir, jumlah pemohon mulai melandai. "Dalam dua hari terakhir ini rata-rata perekaman kembali normal di kisaran 195 orang per hari," katanya.

Perekaman dilakukan kecamatan. Hal ini untuk mengurangi kepadatan antrean di Mal Pelayanan Publik (MPP). "Sejak beberapa bulan lalu, kami sebar blanko ke tiap kecamatan untuk perekaman," katanya. Menurut Reddy, setiap kecamatan tetap disebarkan 1.500 keping blanko. (eza/hen)



URUS KARTU IDENTITAS: Nur Azizah (kiri) yang baru berusia 17 tahun menjalani perekaman e-KTP di Mal Pelayanan Publik kemarin (7/1).

Jawa Pos

DINAS PERHUBUNGAN



ANGGER BONDANI/JAWA POS

SUPAYA LEBIH TERTIB: Pembuatan jalur khusus sepeda pascal di Jalan Ponti diharapkan membuat lalu lintas lebih teratur.

Cegah Kecelakaan, Bangun Jalur Sepeda di Jalan Ponti

SIDOARJO – Para pengguna sepeda yang me-lintasi Jalan Ponti bakal lebih aman. Dishub Sido-

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

arjo membuat jalur khusus sepeda di jalan tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pembuatan jalur khusus ditandai dengan garis marka di sisi jalan untuk memisahkan pesepeda dari kendaraan bermotor.

Kabid Lalu Lintas Dishub Sidoarjo Dwitjahjo Mardisunu mengatakan, lalu lintas di Jalan Ponti cukup padat. Sementara jumlah masyarakat yang memakai sepeda juga banyak. "Jika tidak dipisah, adapatensi terjadi kecelakaan," kata Mardisunu.

Menurut dia, pembangunan jalur sepeda merupakan bagian dari penataan transportasi. Dishub akan memantau penggunaan lajur khusus tersebut. Jika hasilnya positif, konsep serupa akan diterapkan di ruas jalan lainnya. (**ful/hen**)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bahas Pilkades dan Peningkatan Pemberdayaan Desa

Sidoarjo, Memorandum

Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) menggelar koordinasi dengan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana, Selasa (6/1). Acara itu digelar di ruang rapat rumah dinas wabup dengan mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sidoarjo untuk membahas beberapa persoalan.

Ketua FPBD Sidoarjo Sigit Setiawan yang didampingi 9 pengurus menyampaikan kiranya pihaknya dalam membantu membangun pemkab melalui pemberdayaan desa. Salah satunya dengan memberi pemahaman perihal tujuan ke-BPD-an, sejak FBPD Kabupaten Sidoarjo didirikan pada 2017.

"Dengan adanya FBPD, BPD

FPBD juga membahas masalah pilkades dengan Probosutomo, perwakilan DPMD. Terutama terkait penyerapan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dalam Pasal 118 Huruf B yang merupakan pasal peralihan itu, harus dilaksanakan bagi 86 desa yang akan melakukan pilkades. Di sisi lain, rakyat juga

membahas organisasi lain yang serupa dengan FBPD. Sigit juga menyampaikan terima kasih kepada wabup yang bergerak cepat fokus pada kebutuhan pusat untuk menyelesaikan usulan-usulan pembangunan warga. Seperti yang dilakukan merespons Sunaryo, warga Desa Boro, Kecamatan Tangulangan. Sunaryo memuji proyek pelebaran jalan dekat sekolah yang terselaskan dalam jangka 2 minggu. (sud/san/epe)



Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) foto bersama usai menggelar koordinasi dengan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana.

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



ANGGER BONDAN/JAWA POS

SARANA PENGAIRAN: Pekerja sedang merampungkan pembuatan ruang operator proyek rumah pompa Kedungpeluk. Progres pembangunan telah mencapai 75 persen.

Proyek Rumah Pompa Kedungpeluk Ditargetkan Tuntas Bulan Ini

SIDOARJO – Molornya proyek rumah pompa Kedungpeluk berdampak pada banjir di empat desa yakni Kendalpecabean, Kalipecabean, Kedungbanteng dan Banjarasri. Proyek se nilai Rp 7 miliar itu seharusnya rampung akhir 2025. Masyarakat berharap proyek segera dituntaskan agar banjir segera teratasi.

Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sido-

arjo Muhammad Makhmud memastikan, pembangunan rumah pompa akan selesai akhir Januari ini. "Progres pekerjaan saat ini telah mencapai 75 persen," katanya.

Makhmud mengaku telah mendorong kontraktor untuk merampungkan plester bagian bawah rumah pompa. Tujuannya agar pompa bisa segera difungsikan untuk mengalirkan air.

"Penambahan personel juga dilakukan untuk memperce-

pat penyelesaian proyek," kata Makhmud. Jika rumah pompa selesai, genangan di permukiman bakal segera surut.

Salah satu warga Kedungbanteng Sulaiman mengeluhkan banjir yang sudah berlangsung lebih dari sebulan. Sebagian saluran tertutup proyek dan menyebabkan genangan. "Gara-gara banjir, anak belajar daring. Kami berharap rumah pompa segera diselesaikan," katanya. (ful/hen)

Jawa Pos